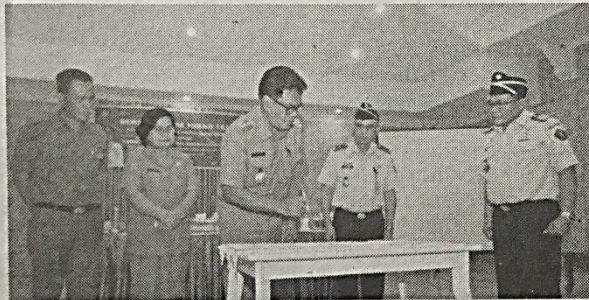




Pemda Hibah Tanah ke Kantor Imigrasi Tahuna

Sangihe, KOMENTAR

Pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghibahkan tanah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Selasa (11/2). Adapun penyerahan hibah ini oleh Bupati Sangihe Jabes E Gaghana yang berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati. "Agenda ini sangat penting dan strategis, dalam rangka membangun kemitraan dan etika dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita," kata Gaghana. Lanjut dia, hal ini kiranya menjadi energi positif dan sumber inspirasi dalam mengemban tugas. "Jalannya berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak lepas dari dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di daerah," kata-



□ Bupati Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana menandatangani naskah hibah lahan ke Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna.

nya lagi. Termasuk kendali Kantor Kemenkum HAM Sulawesi Utara dan jajaran di Sangihe melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. "Dengan melihat secara langsung permasalahan dan kesulitan yang dialami di daerah perbatasan NKRI, yang nantinya dapat dirumuskan menjadi program strategis untuk pengembangan da-

erah perbatasan," ungkapnya. Lebih jauh kata dia, kerjasama yang terbangun selama ini dalam mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan sudah terbina dengan baik. "Untuk itu Pemkab Sangihe menghibahkan tanah pembangunan rumah dinas ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tahuna," sebutnya. Sementara itu Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Lumaksono menjelaskan, penyerahkan hibah tanah

bagi Kantor Imigrasi kelas II Tahuna merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dalam memajukan daerah. "Ini adalah suatu bentuk nyata, bahwa untuk mengembangkan suatu daerah, dukungan ini memang sangat diperlukan. Demi kelancaran organisasi khususnya bidang imigrasi dan dapat menunjang kelanjutan pembangunan di kabupaten khususnya dan provinsi pada umumnya," tuturnya. Diharapkannya, kerjasamanya lebih dapat ditingkatkan, karena kebutuhan organisasi juga membutuhkan kantor untuk imigrasi dan Lapas yang lebih luas. "Karena perkembangan baik dari skala kependudukan, maka perlu diantisipasi kedepannya, dengan penyediaan lahan pembangunan Lapas dan Kantor Imigrasi dalam meningkatkan pelayanan," tandasnya. (sal/bos)